

SKRIPSI

KONFLIK KASHMIR DAN PENGARUHNYA TERHADAP HUBUNGAN BILATERAL INDIA PAKISTAN 2015-2021

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk memenuhi persyaratan dalam
memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Pendidikan
Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Mataram



OLEH:

WAHYU RAJAB SAHABUDIN

NIM:118150008

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

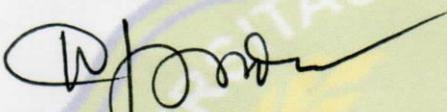
**KONFLIK KASHMIR DAN PENGARUHNYA TERHADAP
HUBUNGAN BILATERAL INDIA PAKISTAN 2015-2021**

Telah memenuhi syarat dan di setujui

Mataram, 13 Juli 2022

Desen pembimbing I

Dosen pembimbing II


Ahmad Afandi, S. S., M. Pd
NIDN. 0819038401


Dian Eka Mayasari, M. Pd
NIDN. 0830098802

Menyetujui :

**Program Studi Pendidikan Sejarah
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan
Ketua Program Studi**


Ahmad Afandi, S.S., M. Pd
NIDN. 0819038401

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

KONFLIK KASHMIR DAN PENGARUHNYA TERHADAP HUBUNGAN BILATERAL INDIA PAKISTAN 2015-2021

Skripsi atas nama Wahyu Rajab Sahabudin telah di pertahankan di depan dosen
penguji Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram

Mataram, 26 Juli 2022

Dosen Penguji

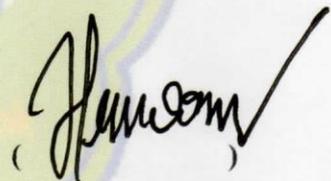
1 Ahmad Afandi, S.S., M.Pd (Ketua)
NIDN. 0819038401



2 Rosada, S.Pd., M.Pd (Anggota)
NIDN. 0821028401



3 Ilmiawan Mubin, M.Pd (Anggota)
NIDN. 0811108504



Mengesahkan:

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM



Dekan,



Dr. Muhammad Nizaar, M.Pd.Si
NIDN. 0821078501

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Mataram menyatakan bahwa.

Nama : Wahyu Rajab Sahabudin
NIM : 118150008
Alamat : Jln. Merdeka Raya No. 01 Mataram

Memang benar Skripsi yang berjudul *Konflik Kashmir dan Pengaruhnya Terhadap Hubungan Bilateral India Pakistan 2015-2021* adalah asli karya sendiri dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik di tempat manapun.

Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing. Jika terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah di publikasikan, memang di acu sebagai sumber dan di cantumkan dalam daftar pustaka.

Jika dikemudian hari pernyataan saya ini terbukti tidak benar, saya siap mempertanggung jawabkannya, termasuk bersedia menanggalkan gelar kesarjanaan yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Mataram, 28 Juli 2022

Yang membuat pernyataan



Wahyu Rajab Sahabudin
NIM. 118150008



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wangyu Rasab Sahabudin
NIM : 118150008
Tempat/Tgl Lahir : Dukalong 10 oktober 1997
Program Studi : Pendidikan Sejarah
Fakultas : FKIP
No. Hp : 0813 7286 9393
Email : wangyu.sahabudin@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

KONFLIK KASHMIR DAN PENGARUHNYA TERHADAP HUBUNGAN BILATERAL
INDIA PAKISTAN 2015 - 2021

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 38%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 09 Agustus 2022
Penulis



Wangyu Rasab Sahabudin
NIM. 118150008



Mengetahui,
Kepala UPT Perpustakaan UMMAT
Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wanhyu Rasab Sanabudin
NIM : 118150008
Tempat/Tgl Lahir : Dubloug, 10 Oktober 1997
Program Studi : Pendidikan Sejarah
Fakultas : FKIP
No. Hp/Email : 0813 7286 9343 / wanhyusyanabudin@gmail.com
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

KONFLIK KASHMIR DAN PENGARUHNYA TERHADAP HUBUNGAN BILATERAL
INDIA PAKISTAN 2015 - 2021

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 09 Agustus 2022

Penulis



Wanhyu Rasab Sanabudin
NIM. 118150008



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

PERSEMBAHAN

1. Kepada ayah dan ibuku tercinta “Rajab Sahabudin & Nurhayati Dasing” yang senantiasa terus mendukung dan memotivasiku selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi hingga selesai tepat waktu.
2. Bapakku tercinta “Ahmad Sahabudin” yang selalu mensupport dan memenuhi kebutuhanku baik secara moral maupun moril selama menempuh pendidikan hingga selesai tepat waktu.
3. Kepada kakek dan nenekku “Yusuf Dasing & Sariba Banghana” yang terus mendukung dan menyemangati dalam proses pendidikanku.
4. Kepada adik-adiku “Rahul R. Sahabudin, Sintia R. Sahabudin, Afrizal R. Sahabudin”. Yang selalu memberi semangat sehingga penyusunan skripsi ini selesai sesuai harapan.
5. Kepada para dosenku tercinta “Ahmad Afandi,M.Pd, Dian Eka Mayasari,M.Pd, Rosada,M,Pd, Ilmiawan,M.Pd” yang sudah membantu dan membimbingku dalam penyusunan Skripsi ini.
6. Kepada teman-teman terbaikku “Isra Safitri, Rizki N. Djae, Rafika umar, Adi Pratama Djadi, Hapsa Sibala, Abdul Malik, Sofyan Karim, Abdul Azis, M. Suherman, Panji Miran” yang selalu mensupport dan mendukung dalam penyusunan skripsi ini.
7. Kepada keluarga besar Forum Komunikasi Mahasiswa Alor (FKMA) yang telah memberikan Rumah, cinta dan kasih sayang selama berada di di tanah lombok ini.
8. Teman-teman seangkatanku “Novi Antika, Elisa Aristya, Sri Banun, Uswatun Hasanah, Elis Nurimani” yang sudah bersama-sama dalam menempuh pendidikan di perguruan tinggi hingga kita bisa selesai secara bersamaan.

MOTO

Obat terbaik bagi mereka yang takut, kesepian atau tidak bahagia adalah pergi keluar, ke suatu tempat dimana mereka bisa diam, sendirian dengan surga, alam dan tuhan. Karena hanya pada saat itulah seseorang merasa bahwa semua sudah sebagaimana mestinya.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan ridho-Nya, sehingga Skripsi *Konflik Kashmir dan Pengaruhnya Terhadap Hubungan Bilateral India Pakistan 2015-2021* dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Skripsi ini membahas tentang konflik kashmir serta pengaruhnya hubungan bilateral antara India dan Pakistan yang mungkin dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjtnya. Skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi strata satu (S-1) Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram.

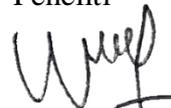
Penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini atas bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis seyogyanya mengucapkan terimakasih yang mendalam kepada.

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd. Gani, M.Pd sebagai Rektor UMMAT
2. Dr. Muhammad Nizaar, M.Pd.Si Sebagai Dekan FKIP UMMAT
3. Bapak Ahmad Afandi, S.S., M.Pd. Sebagai Ketua Prodi Pendidikan Sejarah, sekaligus Dosen Pembimbing I
4. Ibu Dian Eka Mayasari, M.Pd. Sebagai Dosen Pembimbing II
5. Kedua orang tua saya yang selalu memberikan dukungan baik secara moril maupun moral kepada saya
6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang juga telah memberikan kontribusi memperlancar penyelesaian skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, saran dan kritik konstruktif sangat peneliti harapkan. Akhirnya, peneliti berharap skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pengembangan dunia pendidikan.

Mataram, 28 Juli 2022

Peneliti



Wahyu Rajab Sahabudin
NIM. 118150008

Wahyu Rajab Sahabudin. 2022. **Konflik Kashmir dan Pengaruhnya Terhadap Hubungan Bilateral India Pakistan 2015-2022**. Skripsi. Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram

Pembimbing 1 : Ahmad Afandi, S.S., M.Pd.

Pembimbing 2 : Dian Eka Mayasari, M.Pd.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Konflik Kashmir Terhadap Hubungan Bilateral India Pakistan serta status yang dimiliki oleh Kashmir pada saat ini. Konflik yang terjadi di wilayah Kashmir melibatkan India dan Pakistan menjadi konflik yang berkepanjangan dan sudah menjadi isu internasional. Konflik terjadi semenjak kolonial Inggris membagi wilayah menjadi dua negara pada tahun 1947. Konflik sengketa wilayah Kashmir ini tidak terjadi semata-mata karena perebutan atas suatu wilayah, namun terdapat beberapa kepentingan yang kompleks menjadi latar belakang terjadinya konflik yang berkepanjangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan historis. Hasil penelitian ini adalah 1). Hubungan India dan Pakistan memang rumit lantaran sejumlah insiden sejarah, agama maupun politik. Berbagai upaya diplomasi telah dilakukan tetapi mengalami kegagalan akibat ketegangan dari kedua negara yang terus berlanjut. 2). Status khusus Kashmir selama ini dijamin oleh konstitusi India yang tercantum dalam pasal 370, tetapi kemudian pada tahun 2019 pasal itu dicabut dengan ketentuan Kashmir harus mengikuti konstitusi dari India. Dalam konflik ini kedua negara diharapkan mampu mengakhiri konflik, karena banyaknya korban yang meninggal serta pelanggaran hak asasi manusia.

Kata Kunci : Konflik Kashmir, Hubungan Bilateral, India-Pakistan

Wahyu Rajab Sahabudin. 2022. Kashmir Conflict and Its Effect on India Pakistan Bilateral Relations 2015-2022. Thesis. Mataram: Muhammadiyah University of Mataram

Consultant 1: Ahmad Afandi, S.S., M.Pd.

Consultant 2: Dian Eka Mayasari, M.Pd.

Abstract

This study aimed to ascertain how the Kashmir Conflict-affected bilateral ties between India and Pakistan and the current situation in Kashmir. India and Pakistan's war in the Kashmir area has become a protracted battle and a global concern. Since the region was split into two countries by British colonialism in 1947, there has been strife. The fight over Kashmir was not merely sparked by a struggle for dominance over a particular area; rather, several intricate interests emerged as the background to the protracted conflict. This study employed qualitative research methods. In-depth analysis is used in a descriptive study known as "qualitative research" to address concerns about the Kashmir Conflict and Its Impact on India-Pakistan Bilateral Relations from 2015 to 2021. the findings of this research are 1) Relations between India and Pakistan are complicated by some historical, religious, and political events. Due to the continued hostilities between the two nations. Still, they have fallen short. 2 Kashmir's unique status is protected by the Indian constitution, which is spelled out in Article 370. However, that item was later repealed in 2019 with the need that Kashmir adheres to India's constitution. Due to the significant number of casualties and breaches of human rights in this conflict, it is anticipated that the two countries will be able to resolve it.

Keywords: Kashmir Conflict, Bilateral Relations, India-Pakistan



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
PERSEMBAHAN	vii
MOTO	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.4.1 Manfaat Teoritis	6
1.4.2 Manfaat Praktis	6
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Pengertian Konflik Lewis Coser.....	7
2.2 Permintaan Berdirinya Pakistan.....	8
2.3 Pasca Kemerdekaan (Setelah Tahun 1947)	12
2.4 Konflik Perebutan Wilayah Kashmir oleh India dan Pakistan	13
2.5 Bukti Ancaman dari India.....	16
2.6 Perang Kashmir (1947-1948).....	18
2.7 Perang Kashmir tahun 1965.....	19
2.8 Perang India-Pakistan tahun 1971.....	20
2.9 Perang Kargil 1999	21
2.10 Internasionalisasi Kasus Kashmir	23

2.11 Penelitian Relevan.....	24
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	26
3.2 Batasan Temporal	26
3.3 Pendekatan Historis.....	26
3.3.1 Heuristik (pengumpulan sumber-sumber sejarah)	27
3.3.2 Kritik Sumber	28
3.3.3 Interpretasi (menafsirkan sumber sejarah)	29
3.3.4 Historiografi (Penulisan Sejarah).....	30
3.4 Data dan Sumber Data.....	30
3.4.1 Data	30
3.4.2 Sumber Data	30
3.5 Teknik Analisis Data.....	31
3.5.1 Reduksi Data.....	31
3.5.2 <i>Data Display</i> (Penyajian Data)	32
3.5.3 Verifikasi/Penarikan Kesimpulan	32
3.6 Keabsahan Data	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Pengaruh Konflik Kashmir Terhadap Hubungan Bilateral India Pakistan	34
4.2 Status Yang Dimiliki Khismar Saat Ini.....	42
BAB V PENUTUP	
5.1 Simpulan.....	47
5.2 Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konflik yang sedang berlangsung antara India dan wilayah Kashmir Pakistan telah menjadi isu global. Kontroversi ini muncul sejak kolonialisme Inggris pada tahun 1947 membagi wilayah menjadi dua negara. India dan Pakistan adalah negara otonom. Namun, pembagian regional Kashmir menjadi domain India berubah menjadi proses dengan perjuangan hasil hingga saat ini. Sejak Inggris mengisolasi kedua domain ini, situasi yang tidak dapat didamaikan atas kontrol lokal Kashmir ini telah diwujudkan berubah menjadi bentrokan signifikan antar negara..

Konflik Kashmir ini lebih dari sekedar perebutan kekuasaan regional, ada beberapa kepentingan kompleks yang melatarbelakangi konflik yang berlangsung lama. Berawal dari variabel yang ketat, sebagian besar individu Kashmir adalah Muslim. Jadi secara intelektual, ia akan merasa terikat dan Pakistan merasa terikat untuk menjadi dekat berdasarkan kemiripan filosofis. Bagaimanapun, para penguasa di Kashmir kewalahan oleh umat Hindu dan Maharaja Singh yang berubah menjadi pemimpin Kashmir di pada tahun 1947, sehingga pasti akan setuju dengan pemerintah India. Ini adalah salah satu alasan Kashmir telah berubah menjadi bentrokan yang merepotkan untuk sampai pada tanda pemahaman, mengingat fakta bahwa pedalaman Kashmir sendiri ada radikal berturut-turut, perang psikologis, dan serangan yang dilengkapi.

Secara militer, di daerah Khasmir ada instalasi tentara India yang sedang berkembang. Dengan militer memperoleh kekuatan, India memiliki opsi untuk mengelola dan menguasai wilayah Kashmir. Ini dapat dilihat melalui beberapa contoh perang yang telah terjadi sejak kedua negara menjadi bebas, dimulai dari pada tahun 1947, 1965, 1971, dan 1999. Dari beberapa kali ada percepatan ketegangan militer, India menemukan cara untuk memukul mundur kekuatan militer Pakistan dengan menyelesaikan gencatan senjata dan kebijaksanaan dengan menandai kesepakatan yang disepakati.

Hitung keadaan normal wilayah Kashmir, karenanya menarik pertimbangan pemegang kekuasaan. Kondisi reguler Kashmir menyerupai surga yang terletak di kaki Himalaya . Dengan tanah yang subur, pemandangan yang indah, dan

perkembangan saluran air yang luar biasa Indus, Jhelum, dan Chenab yang secara signifikan bermanfaat bagi daerah agraria. Potensi luar biasa untuk tempat liburan yang sangat terkenal dengan kemegahan normalnya dan juga merupakan fokus modern bulu domba dan permadani. *A garden of eternal spring dan an iron for a palace of kings* berubah menjadi moniker Kashmir untuk aset reguler yang dimilikinya. Dengan hasil bumi yang sangat menggembirakan bagi perekonomian di kemudian hari, salah satunya adalah bisnis material (Rizky, 2016).

Beberapa pilihan telah dilihat sebagai jawaban untuk pertikaian debat Kashmir, dimulai dari tujuan perjuangan PBB pada tahun 1948, membantu dari negara-negara adidaya seperti Amerika, Rusia, dan Cina juga ikut serta tawaran. Berbagai upaya telah diambil dan dicoba oleh kedua negara untuk menguraikan kesepakatan. India dan Pakistan setuju untuk gencatan senjata dan menyelesaikan di divisi lokal di mana India cocok dengan tagihan untuk 66% dan Pakistan memenuhi syarat kebutuhan akan 33% ruang kasmir (Media Indonesia, 2015).

Pada tahun 1965, konflik kembali meningkat, menandai kegagalan Resolusi PBB Pada tahun 2008, hubungan antara kedua negara berada dalam kekacauan setelah unjuk rasa militan di Pakistan menyerang Mumbai. Menghadiri pertandingan kriket berjalan seperti jarum jam sebagai salah satu dari upaya untuk mendefinisikan hubungan hebat antara India dan Pakistan. Dua negara terlihat dan selamanya bersaing dalam game, membuat terlihat seperti konflik non-tempur. Banyak konferensi percaya bahwa partisipasi dalam Pesta Olahraga dapat sangat mempengaruhi perdamaian kedua negara, membangun rasa saling percaya, dan memberikan kebijaksanaan dan kerjasama di berbagai bidang (Pasricha, 2012).Pakistan berpendapat bahwa India terus menurun untuk memenuhi jaminannya untuk menawarkan individu Kashmir kesempatan untuk memutuskan predetermination-nya sendiri. Meskipun India berpendapat bahwa Pakistan adalah pelanggar yang mantap melawan pemberontakan dan mengambil alih kendali atas Kashmir secara paksa (Hau, Ravichandran, dan Guido, 2013).

Dari 2012 residensi pemimpin negara bagian top Manmohan Singh hingga masa pemimpin negara bagian teratas Narendra Modi pada 2018. Banyak upaya dilakukan oleh pemerintah India dalam hal apa pun, perselisihan belum sampai pada akhir harmoni. Dari berbagai upaya dalam mengelola unsur-unsur perjuangan

Kashmir hingga saat ini, India telah menggunakan banyak metode baik secara militer (*hard power*) maupun kebijaksanaan dan kolaborasi (*soft power*).

Pada April 2012 kedua negara saling menunjukkan kekuatan keras dengan uji atom, pekerjaan ini memicu hubungan antara kedua negara untuk melakukan pemanasan sekali lagi. Bagaimanapun, ditempa maju dengan 29 September 2013 kekuatan halus terlihat dari pemimpin Negara India Manmohan Singh dan Nawaz Sharif Kepala negara Pakistan yang bertemu di New York pada suatu kesempatan *United Nations General Assembly*. Mereka setuju untuk menghentikan setiap serangan yang terjadi dan mengikuti keadaan harmoni antara kedua negara dengan berkolaborasi dan membentengi batas-batas Garis Kontrol (York, 2013).

India dan Pakistan, dua negara yang selalu berperang, tidak pernah menyepakati wilayah kedaulatannya sendiri, terutama wilayah sengketa yaitu Kashmir. Wilayah tersebut telah menjadi sengketa perbatasan yang belum terselesaikan. Batas negara dan wilayah merupakan batas-batas langsung yang harus dipenuhi sebagai syarat berkembangnya suatu negara, terlepas dari variabel pendukung lainnya. Hal ini membuat isu perbatasan dan kekuasaannya menjadi isu yang sensitif. Ini adalah masalah yang pelik. Wilayah sebagai bagian dari kedaulatan, dan tentu saja masalah kekuasaan negara atas wilayah teritorial, diperebutkan dengan sengit oleh Sengoku.

Seperti dilansir REPUBLIKA.CO.ID, New Delhi (Rabu 24 Maret 2021 15:00 WIB), Perdana Menteri India Narendra Modi akan memberi tahu Perdana Menteri Pakistan Imran Khan pada Selasa (23 Maret 2021) saya telah mengirim surat. Pada poin surat, Modi memahami bahwa India perlu mendefinisikan hubungan signifikannya dengan Pakistan. Surat ini ditulis bertepatan dengan Hari Pakistan yang diperingati setiap Jalan 23. Hari Pakistan adalah hari penting untuk mempertimbangkan tujuan Pakistan di Walk 23 pada tahun ketika berada di bawah pemerintahan lokal Inggris pada tahun 1940. Pada saat itu, 4.444 pemerintah Muslim di Lahore timur menuntut 4.444 negara bagian Muslim yang lebih besar diizinkan untuk menangani situasi sebagai 'negara bebas'. Dua pejabat Kementerian Luar Negeri Pakistan mengkonfirmasi poin-poin penting dalam surat kepada media Pers terkait.

Sebagai negara tetangga, India membutuhkan hubungan baik dengan Pakistan. (Mencapai) ini adalah dasar untuk membangun kepercayaan tanpa rasa

takut atau agresi, ”tuliskan Modi dalam surat itu. Pesan Modi diikuti dengan pernyataan yang menunjukkan kemajuan dan penyelesaian aplikasi. Beberapa hari setelah Khan mengumumkan dia menginginkan hubungan persahabatan dengan India, berbagai partai politik sejauh ini telah membahas pertukaran air dari Sungai Indus di New Delhi. Untuk mencapai ini, India harus memimpin pada saat itu, dengan alasan bahwa proposal harmonisasi sebelumnya secara definitif tidak dapat diterima. , mendorong surat Modi, menganggapnya sebagai "pesan yang murah hati".

urat Modi kepada Khan dikirim beberapa hari setelah kepala taktik Pakistan, Jenderal Kamal Javed Bajwa, menyerukan agar target diam di distrik Kashmir yang disengketakan dan memulai pembicaraan harmonis dengan India. Bulan lalu, militer kedua negara mengeluarkan pernyataan bersama yang menyatakan gencatan senjata. di sepanjang perbatasan yang disengketakan di Kashmir. Gencatan senjata dipilih setelah banyak baku tembak baru-baru ini.

Dalam laporan tinjauan keuangan Pakistan yang diberikan oleh UNDP Pakistan dan OPHI College of Oxford, dinyatakan bahwa 39% orang Pakistan hidup dalam kebutuhan, dengan tingkat keterpurukan yang paling penting di daerah FATA dan Balochistan. Meskipun tingkat kebutuhan di Pakistan telah berkurang dengan kuat dari 55% menjadi 39% dari 2004 hingga 2015, kemajuan berbagai tempat telah miring. Tercatat 54,6% masyarakat miskin berada di wilayah negara dan hanya sekitar 9,3% penduduk miskin berada di wilayah metropolitan.

Pakistan sendiri kini menjadi negara dengan tingkat ekonomi rendah, yang secara langsung mempengaruhi berbagai wilayah seperti Balochistan, provinsi terbesar di Pakistan dan beberapa wilayah lain yang rata-rata berpenduduk rendah. Dalam hal kesulitan, Pakistan telah unggul dalam menangani berbagai proyek seperti mengumpulkan komunikasi, menyediakan perbekalan, memfasilitasi akses ke air, membangun kapasitas, dan mempersiapkan untuk memelihara dan memelihara makhluk hidup. Untuk mengatasi krisis dan masalah kemiskinan di Pakistan, pemerintah bekerja sama dengan IMF untuk menyelamatkan ekonomi negara itu melalui program stabilisasi ekonomi makro dengan bantuan US\$7,6 miliar. Raih peluang yang ditawarkan oleh pemerintahan perdana menteri. Yusuf Raza Gilani (2008-2012) mengeksplorasi pendekatan efektivitas keuangan berikut ini: B. Menekan pertumbuhan dan merangsang upah untuk membenarkan bunga bank.

Terlepas dari proyek dan inisiatif sektor publik serta partisipasi di berbagai badan seperti UNDP dan IMF, Pakistan sebenarnya memiliki beberapa faktor serius yang tidak menyulitkan untuk mengatasi resesi di negara tersebut. Sangat tinggi, mencapai 1,86%. Faktor lain yang mempengaruhi adalah perpajakan yang tidak setara sebagai bentuk pemerasan dalam pengaturan negara seperti kotoran. 80% pajak yang dikenakan di Pakistan berasal dari orang miskin, karena tidak ada diskriminasi pajak berdasarkan tingkat pendapatan.

Dapat disimpulkan bahwa konflik antara kedua negara tersebut hubungan bilateral sangat sulit untuk dibangun mengingat kedua negara sama tidak mau saling mendengar, yang mana konflik ini dimulai sejak tahun 1947 sampai saat ini belum ada cara untuk berdamai. Berdasarkan data dan kenyataan tersebut, peneliti ingin membahas hal ini secara lebih rinci terkait **Konflik Khasmir dan Pengaruhnya Terhadap Hubungan Bilateral India Pakistan 2015-2021**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti akan mengkaji lebih mendalam mengenai hubungan bilateral india pakistan.

1. Bagaimana pengaruh Konflik Kashmir Terhadap Hubungan Bilateral India Pakistan ?
2. Bagaimana dengan status yang dimiliki oleh kashmir pada saat ini ?

1.3 Tujuan Penelitian

Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat baik bagi peneliti sendiri maupun pihak-pihak yang ingin menggunakan penelitian ini sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya, baik secara teoritis maupun praktis untuk:

1. Mengetahui pengaruh Konflik Kashmir Terhadap Hubungan Bilateral India Pakistan.
2. Mengetahui status yang dimiliki oleh kashmir pada saat ini.

1.4 Manfaat Penelitian

Semoga dari Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sebuah manfaat bagi peneliti sendiri maupun bagi yang ingin menggunakan penelitian ini sebagai bahan refrensi untuk penelitian selanjutnya baik secara teoritis maupunpraktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi kepada peneliti untuk lebih mengembangkan lagi penelitiannya.
2. Sebagai bentuk pemahaman untuk memperdalam informasi terkait konflik kashmir dan pengaruhnya terhadap hubungan bilateral india pakistan 2015-2021.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Sebagai sarana informasi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengangkat tentang konflik kashmir dan pengaruhnya terhadap hubungan bilateral india pakistan.
2. Menambah daya apresiasi pembaca terhadap perkembangan dari konflik kashmir dan pengaruhnya terhadap hubungan bilateral india pakistan 2015-2021



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Konflik Lewis Coser

Teori yang disinggung oleh peneliti ini adalah teori konflik oleh Lewis A. Coser yang untuk situasi ini telah terlihat bahwa perselisihan di antara India dan Pakistan juga merupakan konflik sosial. Dalam berbicara tentang keadaan bentrokan yang berbeda, Coser mengakui perselisihan yang masuk akal dari yang tidak masuk akal. Bentrokan yang masuk akal berasal dari ketidakpuasan dengan permintaan tertentu yang terjadi dalam hubungan dan dari manfaat yang dapat dibayangkan yang dinilai dari anggota dan yang ditugaskan pada item yang dianggap membuat frustrasi. Sementara bentrokan non-praktis, artinya, perselisihan yang tidak dimulai dari tujuan lawan lawan, namun dari kebutuhan untuk menghentikan tekanan, pada dasarnya dari salah satu pertemuan.

Coser menggambarkan perjuangan sebagai ketidaksepakatan mengenai nilai-nilai, nilai atau permintaan mengenai status, kekuasaan, dan sumber-sumber kelimpahan dari mana stok kurang. Coser negara, pertanyaan atau bentrokan mungkin terjadi antara orang-orang, kolektivitas, atau di antara orang-orang dan bermacam-macam. Semua hal dipertimbangkan, bentrokan di antara pertemuan dan intra-tandan umumnya ada di mana individu tinggal masing-masing. Seperti yang ditunjukkan oleh perjuangan Coser juga merupakan komponen koneksi yang signifikan, dan tidak boleh dikatakan sama sekali bahwa perselisihan dalam setiap kasus mengerikan atau merusak perlindungan atau bahaya. Perjuangan dapat berkontribusi banyak pada pemeliharaan dan membentengi hubungan antara individu-individunya, misalnya, menghadapi musuh bersama dapat menggabungkan individu, menghasilkan ketabahan dan inklusi dan menyebabkan individu mengabaikan konflik batin mereka sendiri.

Kemampuan positif perselisihan seperti yang ditunjukkan oleh Lewis A. Coser adalah metode atau sekali lagi aparat untuk melindungi, mengikat

bersama, dan bahkan untuk menggarisbawahi kerangka sosial saat ini. Rekomendasi yang dikemukakan oleh Lewis Coser adalah:

1. Kekuatan ketabahan ke dalam dan mengumpulkan kombinasi di dalam (dalam kelompok) akan meningkat jika tingkat agresi atau perselisihan dengan pengumpulan eksternal yang ukurannya berkembang.
2. Kejujuran yang terangkat dari pertemuan yang terkait dengan perselisihan dapat membantu memperkuat batas-batas antara pertemuan itu dan pertemuan yang berbeda dalam iklim itu, terutama yang mengancam atau mungkin menghasilkan agresi.
3. Dalam pertemuan itu ada perasaan berkurangnya pertentangan dari perpecahan atau kehancuran, dan semakin tinggi aktivitas pada pemahaman dan kesesuaian.
4. Kemerosotan dalam pertemuan itu umumnya tidak ditanggung, jika mereka tidak dapat diyakinkan dengan cara yang benar, mereka kemungkinan digulingkan atau dimasukkan ke dalam pemeriksaan kritis.
5. Selanjutnya, sebaliknya, jika pertemuan itu tidak dirusak dengan perjuangan dengan mengancam pertemuan eksternal, ketegangan yang solid pada minimalisasi, keselarasan, dan kewajiban untuk berkumpul sangat mungkin Berkurang. Konflik batiniah dapat muncul permukaan dan yang bisa dialih bicara, dan tikungannya mungkin lebih banyak bertahan, sebagian besar orang akan mengamankan lebih banyak ruang untuk kesalahan mencari kepentingannya sendiri itu besar.

Lebih jauh lagi, pandangan Louis Coser tentang hubungan pertemuan eksternal memiliki sedikit kemiripan dengan pandangan George Simmel, karena dalam hal ini adalah dimensi serupa yang menjelaskan efek menguntungkan dari pertemuan eksternal.

2.2 Permintaan Berdirinya Pakistan

Sikap membutuhkan kebebasan dan memiliki perasaan identitas India muncul ketika ada perselisihan dan ketidaktaatan oleh penguasa India sebagai pelopor pada tahun 1857, meskipun Inggris memiliki pilihan untuk secara efektif melakukan seperti itu untuk membuat koneksi ke India, dengan mentalitas perlu menjadi otonom pada tahun 1885 telah menang sehubungan

dengan pendirian Partai Kongres. Pada tahun 1905, India meminta pendirian "swaraj" atau pemerintahan sendiri untuk memperjuangkan kebebasan negara India dari kolonisasi berbagai negara dan selanjutnya untuk mencoba mengurangi kebutuhan dengan negara yang berbeda.

Sementara itu, ketidaktaatan Muniny atau Sipahi India yang tak tertandingi yang diselesaikan pada tahun 1857, adalah pemberontakan yang diperlengkapi dari para pejuang EIC (*East India Organization*) yang mendapat bantuan dari individu dan lord Moghul Bahadur Shah. Ini memberi energi dan membentengi pengenalan jiwa publik sebagai perkembangan politik Kongres Publik Seluruh India pada tahun 1885. Kemudian pada tahun 1906, kelompok Muslim keluar dari kongres dan mendirikan Asosiasi Muslim yang merupakan garda depan provinsi Islam Pakistan.

Organisasi Muslim harus bersatu dan mewakili kepentingan umat Islam di India. Di sinilah kelahiran Pakistan sebenarnya dimulai, dan Gerakan Kemerdekaan India pada tahun menyerukan kemerdekaan penuh India. Undang-undang Pemerintah India, yang diumumkan oleh Inggris pada tahun 1935, adalah konstitusi untuk pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat. Partai Kongres dan Liga Muslim memperoleh posisi di Dewan.

Liga Muslim meminta atau menginginkan negara khusus untuk kelompok Muslim, pertama kali diterapkan pada tahun 1940. Itu juga menjelang akhir Perang Dunia II, dengan Liga Muslim menuntut pembentukan negara baru dan pemerintah Inggris, namun Liga Muslim menuntut pembentukan negara-negara baru untuk populasi Muslim India. Permintaan itu akhirnya disetujui oleh pemerintah Inggris dan negara baru bernama Pakistan telah dibuat.

Kebijakan separatisme Kerajaan Inggris, yang bertujuan menciptakan keretakan antara Hindu dan Muslim, dimulai secara besar-besaran pada awal abad ke-20. Saat itulah kekuatan nasionalis Hindu mulai tumbuh, mengancam akan membubarkan kekuatan gerakan oposisi yang koheren. Untuk mengatasi ancaman yang dirasakan ini, pemerintah kolonial Inggris secara aktif mendukung Liga Muslim, sebuah badan politik yang dipimpin oleh

Muhammad Ali Jinnah yang bertujuan mewakili kepentingan anak benua Muslim.

Inggris mengadu dua kelompok ini satu sama lain dan akhirnya memaksa Liga Muslim untuk menuntut pembentukan negara terpisah yang disebut Pakistan. Karena mereka merasa mayoritas Hindu tidak mewakili kepentingan mereka. Upaya Jinnah untuk mempromosikan persatuan Hindu-Muslim mencapai puncaknya. Setelah laporan Nehru diterbitkan pada tahun 1928, laporan itu dikritik dan beberapa amandemen diajukan dan kemudian ditolak. Jinnah akhirnya memutuskan untuk berpisah dari Parlemen.

Pada tahun 1940, sebuah resolusi disahkan yang menyerukan kemerdekaan dari pemerintahan Inggris dan pemerintahan mayoritas Hindu di India. Ini menunjukkan bahwa umat Islam di India bukanlah minoritas tetapi memang 'negara di dalam negara'. Sejak 1940 dan seterusnya, Federasi menanggapi tuntutan negara bagian dalam negosiasi berdasarkan Proposal Agustus, Proposal Cripps, Konferensi Misionaris, dan Rencana Misi Kabinet Shimla. Liga Muslim, yang kemudian dikelola di bawah kepemimpinan Jinnah, menerima persyaratan mereka dan berhasil mendirikan Pakistan.

Usul untuk negara terpisah bagi umat Islam di India pertama kali diajukan oleh Dr Mohammad Iqbal, seorang filsuf dan penyair, pada tahun 1930 di Allahabad, ibu kota India Hindu. Dalam pidato kepresidenannya pada konvensi tahunan Liga Muslim Seluruh India, ia kemudian menganjurkan pembentukan negara terpisah bagi umat Islam, berdasarkan "teori dua negara" yang digariskan dalam doktrin politik Muhammad Ali Jinnah. Tuntutannya menjadi lebih spesifik.

Jinnah menjelaskan bahwa Hindu dan Muslim adalah dua bangsa dengan satu definisi atau ujian nasional. Pakistan dianggap sebagai rumah bagi Muslim India yang mendukung penentuan nasib sendiri. Namun gagasan negara Islam merdeka benar-benar menakutkan dan menjijikkan bagi pimpinan parlementer yang berkeyakinan persatuan India. Maka dimulailah pertengkar, pertengkar antara dua komunitas. Bagi umat Islam itu adalah perjuangan untuk bertahan hidup, bagi umat Hindu itu adalah perjuangan melawan penghancuran tanah air mereka. Ketika pemerintah Inggris

memutuskan untuk memberikan otonomi kepada India pada tahun 1946, kedua komunitas itu terlibat dalam perjuangan pahit yang ditandai dengan kekerasan dan kerusuhan komunitas yang meluas.

Semua partai di parlemen India sangat menentang pemisahan itu sehingga Mahatma Gandhi bersumpah bahwa partisi itu hanya bisa dibawa ke mayatnya, yang mengubah Kongres menjadi gerakan massa. Gerakan non-kooperasi, gerakan pembangkangan sipil dan gerakan India yang tenang yang dia mulai mendapat dukungan positif yang luas dari masyarakat. Inggris kemudian melihat potensi untuk mempengaruhi parlemen melalui Pt. Lord Mountbatten dan keluarganya Nehru menerima perpisahan itu. Louis Francis Albert Victor Nicholas Mountbatten, sering disebut sebagai Penguasa Mountbatten, berasal dari keluarga Inggris terkemuka dan menjabat sebagai First Ocean Master of the Grand Navy, Gubernur Jenderal India dan Gubernur Jenderal India. Lord dan Lady Mountbatten bekerja siang dan malam dan akhirnya bisa menarik Nehru ke dalam skema. Dua komunitas besar di anak benua India hidup berdampingan secara damai selama berabad-abad sebelum kedatangan Inggris. Ini dapat diselesaikan melalui pengadilan yang independen dan kuat yang dapat melindungi hak-hak Muslim dan komunitas lainnya. Ini mengambil bentuk teori dua negara untuk kepentingan

Pada tanggal 3 Juni 1947, Lord Mountbatten mengumumkan rencana pembagian, yang diterima oleh Liga Muslim, Parlemen dan Sikh. Di bawah rencana Mountbatten, Undang-Undang Kemerdekaan India diperkenalkan ke Parlemen Inggris pada 4 Juli 1947. Undang-undang ini disahkan pada 18 Juli. Undang-Undang Kemerdekaan India diberikan untuk menetapkan wilayah India dan Pakistan. Setelah lebih dari 200 tahun mendominasi anak benua itu, pemerintah Inggris melepaskan semua hak atas wilayah ini pada 15 Agustus 1947. Inggris menyerahkan India dan Pakistan kepada dua negara berdaulat. Agitasi kuat MA Jinnah untuk tanah air yang terpisah bagi umat Islam memecah negara dan menghancurkan impian Gandhi tentang India yang bebas dan bersatu.

15 Agustus 1947, nama resmi Republik India dan sistem pemerintahannya berupa Republik Federal dengan Presiden sebagai Kepala

Negara dan Perdana Menteri sebagai Kepala Pemerintahan. Republik India adalah negara terbesar di Asia Selatan, dengan populasi lebih dari 1 miliar dan negara terpadat kedua di dunia dengan mayoritas penduduk Hindu. Pakistan merdeka pada 14 Agustus 1947, awalnya secara resmi disebut Republik Pakistan, tetapi berubah nama menjadi Republik Islam Pakistan pada tahun 1956. Pakistan menjalankan birokrasi konservatif dengan presiden sebagai kepala negara dan kepala negara sebagai kepala pemerintahan. Pakistan adalah negara pedesaan terbesar kedua setelah India dengan populasi lebih dari 172 juta pada sensus 2008, dan mayoritas penduduk Pakistan adalah Muslim Sunni.

2.3 Pasca Kemerdekaan (Setelah Tahun 1947)

Pada akhirnya, India akan terpecah menjadi dua negara merdeka, tetapi masalahnya adalah mereka tidak memantau kenaikan mereka ke tampuk kekuasaan. Dengan demikian, pembagian wilayah tidak adil dan menyimpang. Berdirinya Pakistan telah mengakibatkan konflik antara Hindu dan Muslim yang legitimasinya tinggi. India dan Pakistan pasca-pemisahan tidak pernah puas dengan kompromi dan tindakan persahabatan, seperti yang ditulis seorang kolumnis Pakistan baru-baru ini. antara India dan Pakistan belum mereda sejak negara itu terpecah.

Dua Dominion baru, India dan Pakistan, diberi kebebasan untuk memilih tetap menjadi anggota British Covenant atau keluar. Kekuasaan ini diberikan kepada Majelis Konstituante India dan Pakistan, yang akan membuat konstitusi untuk negara masing-masing. Sampai konstitusi baru diberlakukan, pemerintah baru harus menjalankan kekuasaan di tingkat pusat dan negara bagian di bawah Undang-Undang Pemerintah India 1935 562. Selama pembagian keluarga kerajaan Inggris, fungsi tersebut dilakukan oleh Gubernur Jenderal. Penguasa negara itu diberi tiga pilihan. Pertama, ia bisa secara sukarela bergabung dengan pemerintahan India sebagai organisasi independen. Kedua, mereka dapat bergabung dengan wilayah Pakistan. Ketiga, mereka dapat memilih untuk tetap mandiri.

Namun, mengingat negara raja pada saat itu, di mana penguasa lokal tidak setuju dengan mayoritas warganya, atau tidak setuju dengan perbedaan

pendapat dan perbedaan pendapat dari beberapa agama, mereka merasa sulit untuk membuat pilihan. dari area yang dipertimbangkan: apa itu area? Wilayah Junagadh asli adalah negara yang sangat kecil dengan sekitar 81% penduduk beragama Hindu, tetapi penguasa wilayah Junagadh adalah Muslim yang ingin bergabung dengan Pakistan. Wilayah Junagadh akhirnya bergabung dengan India.

2.4 Konflik Perebutan Wilayah Kashmir oleh India dan Pakistan

Jammu dan Kashmir termasuk wilayah lembah Kashmir, Jammu dan Ladakh dan memiliki populasi sekitar 10 juta. Menurut S.M. Burke dan Salim-udDin Quraishi menunjukkan populasi Jammu dan Kashmir pada malam serah terima:

Tabel 1. Populasi negara bagian jammu dan kashmir pada malam perpindahan kekuasaan.

No	Jammu	Kashmir	Jammu dan Kashmir
1	<ul style="list-style-type: none"> • Muslim 1.208.675 61% • Hindu 772.760 39% 	<ul style="list-style-type: none"> • Muslim 1.489.988 jiwa atau 92% • Orang Hindu 139.217 jiwa atau 8% 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Muslim di negara bagian 3.101.247 jiwa atau 77% • Total orang Hindu di negara bagian 809.165 jiwa atau 21% • Total Sikh ke negara bagian 65. 903 jiwa • Jumlah buddha di negara bagian 40. 696 jiwa • Jumlah penduduk 4. 021. 616 jiwa

Sumber: Dunia Sekitar Kita, Pakistan dan India (Amal Hamzah, 2002:6)

Penaklukan wilayah Kashmir merupakan akibat dari runtuhnya India yang memunculkan negara Pakistan. Kashmir adalah kelompok Muslim dan merupakan bagian fundamental dari Pakistan. Ingat ada dokumen, karena PBB terlibat dalam masalah ini. Sebagai asosiasi paling bergengsi di dunia, Amerika Serikat telah berulang kali melampaui tujuannya untuk memenuhi misinya. Namun, surat kuasa jarang dipertahankan selama sisa tahun 1977.

Pakistan dan India adalah dua negara yang terbelah oleh sengketa wilayah, wilayah ini adalah Kashmir, dan sengketa yang muncul selama ini belum terselesaikan. Kashmir meliputi wilayah seluas kurang lebih 222.235 km² dan terletak di bagian benua India di sebelah utara dan barat, memisahkan Pakistan dari wilayah Kargil. Pada tahun 2001, India menguasai sekitar 100.568 km² Kashmir dengan populasi 10.069.917, sementara Pakistan menguasai sekitar 78.934 km² Kashmir dengan populasi sekitar 3 juta.

Azad dan Kashmir Garis demarkasi antara *Northern Territory* dan Kashmir yang dikelola India berasal dari Garis Gencatan Senjata 1949 di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Itu sebagian besar tetap tidak berubah antara India dan Pakistan pada tahun 1971 dan berganti nama menjadi Garis Kontrol (LOC) sebagai bagian dari Perjanjian Pakistan yang ditandatangani di Shimla pada Juli 1972. Adanya perjanjian tersebut menandakan Kesepakatan Shimla, sebuah perjuangan rakyat Kashmir yang berkuasa dengan tujuan menuju nasionalisme Kashmir. Rakyat Kashmir menginginkan kemerdekaan sebagai bangsa baru yang berdiri sendiri, tidak bergantung pada negara lain, dan tidak bergabung dengan Pakistan atau India. Kesepakatan Shimla menetapkan bahwa semua perselisihan bilateral antara India dan Pakistan akan diselesaikan secara bilateral. Perjanjian tersebut mengharuskan Kashmir menjadi negara baru.

Baik India dan Pakistan mengklaim kedaulatan atas wilayah Jammu dan Kashmir. Keduanya telah menentang PBB dan telah berkampanye untuk Kashmir beberapa kali di masa lalu. Sebagian besar penduduk Kashmir sekarang merasa tidak nyaman dengan konflik tersebut dan ingin melihat Kashmir sebagai negara merdeka. Beberapa percaya bahwa masalah India

dan Pakistan adalah warisan dari sejarah mereka, termasuk sejarah nasionalisme di India dan Pakistan.

Nasionalisme India menganjurkan India yang sekuler dan pluralistik di mana semua agama harus hidup berdampingan. Liga Muslim menyatakan bahwa India terdiri dari dua negara, Muslim dan Hindu, yang ada karena perbedaan yang tidak dapat didamaikan, kontradiksi, kontradiksi sosial, budaya dan sejarah. Karena nasionalisme sekuler India, dia tidak setuju dengan gagasan Kashmir bergabung dengan Pakistan. Oleh karena itu, Kashmir disandera oleh dua nasionalisme ini. Keduanya memegang bagian Kashmir yang mereka kendalikan dan sisanya.

Pilihan referendum untuk menyelesaikan sengketa Kashmir pertama kali diusulkan oleh para pemimpin India pada tahun 1947. Pada saat ini, sengketa aksesori Kerajaan Jammu dan Kashmir dinyatakan antara Lord Mountbatten (Pemerintahan Umum India) dan Jawahar Lal Nehru (Perdana Menteri). Menteri India dengan tegas memilih referendum untuk mengetahui keinginan sengketa Kashmir. India menyerahkan masalah itu ke Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan dua Resolusi Kardinal Perserikatan Bangsa-Bangsa yang disahkan pada 1948-1949 memperkenalkan pemungutan suara populer. Tetapi referendum tidak pernah terjadi dan India gagal memenuhi janjinya. Pakistan sekarang menganggap janji India itu mengikat, sama seperti ketika pertama kali dibuat secara sukarela pada 1947-1948. Politisi India telah menggunakan masalah emosional ini untuk menakut-nakuti publik bahwa India bisa runtuh jika Kashmir berpisah.

Solusi referendum tentang masalah Kashmir telah ditolak oleh India. Dalam persepsi India, ini terdengar seperti "teori dua negara" karena didasarkan pada teori dua negara yang ditolak India. India khawatir akan semakin sulit untuk menangani gerakan separatistis di timur laut India jika Kashmir meninggalkan India dapat diterapkan kembali. Itu sebabnya India memiliki pasukan keamanan yang sangat besar. Upaya sedang dilakukan untuk memecahkan masalah Kashmir dengan pertumpahan darah, bukan dengan alasan, bukan dengan dialog.

2.5 Bukti Ancaman dari India

Perang antara India dan Pakistan dimulai dengan sengketa Kashmir. Untuk menyoroiti masalah wilayah Kashmir pada tahun 1846, Inggris telah memerintah India secara militer dengan bantuan kelompok Hindu, Buddha, dan Sikh. Wilayah Kashmir kemudian dipinjamkan kepada kekuatan feodal Hindu selama sekitar 100 tahun melalui implementasi Perjanjian Amritsar. Ketika anak benua itu terpecah pada tahun 1947 dan penguasa feodal Hindu menyerahkan wilayah Kashmir ke India, perang pecah di mana India menguasai dua pertiga dan Pakistan menguasai sepertiga. Dibatasi oleh jemaat Hindu, Muslim dianiaya dan dibantai. Pada saat yang sama, penguasa Pakistan tidak ikut campur dan terus membiarkan nasib Muslim Kashmir ditekan.

Perang antara India dan Pakistan dimulai dengan sengketa Kashmir. Untuk menyoroiti masalah wilayah Kashmir pada tahun 1846, Inggris telah memerintah India secara militer dengan bantuan kelompok Hindu, Buddha, dan Sikh. Wilayah Kashmir kemudian dipinjamkan kepada kekuatan feodal Hindu selama sekitar 100 tahun melalui implementasi Perjanjian Amritsar. Ketika anak benua itu terpecah pada tahun 1947 dan penguasa feodal Hindu menyerahkan wilayah Kashmir ke India, perang pecah di mana India menguasai dua pertiga dan Pakistan menguasai sepertiga. Dibatasi oleh jemaat Hindu, Muslim dianiaya dan dibantai. Pada saat yang sama, penguasa Pakistan tidak ikut campur dan terus membiarkan nasib Muslim Kashmir ditekan.

Pada tahun 2005, ada penandatanganan sistem kerjasama militer lain antara India dan Amerika Serikat. Sejak itu, India telah berbagi kepemimpinan yang luar biasa dengan Amerika Serikat dalam operasi militer. 2004-2008 adalah periode peningkatan keterlibatan militer antara India dan Amerika Serikat. Tidak ada keterlibatan militer semacam itu yang berkembang hingga hari ini. Ini cenderung terlihat di mana India memimpin kegiatan bersama dengan Amerika Serikat dan membeli senjata di Amerika Serikat. Dari keterlibatan taktis ini, misi kemanusiaan sekarang terpusat dengan kuat.

Mengingat pengembangan senjata India, pemerintah Pakistan telah menyatakan keprihatinan dan keprihatinan atas semangat India untuk memproduksi senjata yang diyakini mengancam keseimbangan kawasan. Ia terus mengembangkan sistem pengiriman senjata canggih, termasuk instalasi, dan sedang membangun senjata nuklir yang besar. Dirancang untuk memperkuat sistem pertahanan. Tentu saja hal ini akan berimplikasi serius bagi perdamaian dan keamanan di Asia Selatan dan Samudera Hindia. Dalam Walk 1998, kemenangan partai politik patriot tradisional Hindu India, Partai Bharatiya Janata (BJP), membawa Atal Behari Vajpayee ke I.K. Gujral ke tempat pemimpin negara.

Dalam rencana politiknya, BJP sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk membentuk India dan menjadikannya salah satu kekuatan nuklir. Rencana ini ditunjukkan dalam lima uji coba nuklir langsung yang dilakukan pada 11 dan 13 Mei 1998 di Pokharan dekat Rajasthan. Peluang tersebut dilihat sebagai upaya India untuk memperkuat kekuatan yang ada sambil memberikan tekanan pada Pakistan sendiri, yang berada dalam posisi untuk melemahkan masalah Kashmir.

India telah menciptakan senjata nuklir sebagai alat strategis internasional untuk mengintimidasi saingannya, menguasai kawasan Asia Selatan dan memberikan pengaruh yang langgeng di kawasan itu. Kami memahami bahwa India, dengan populasi yang besar dan kekuatan finansial yang besar, memiliki dominasi terbesar di kawasan Asia Selatan, teater dilindungi dan dirawat. Itulah sebabnya India merasa perlunya senjata ampuh yang tidak hanya membuat panik berbagai negara, tetapi juga membuat panik negara-negara. Pemimpin Pakistan Yusuf Gailani mengatakan pengembangan persediaan amunisi nuklir India sebanyak hanya akan mempengaruhi pengalaman militer baru India dan menunjukkan dominasi India atas kawasan Asia Selatan. Sementara itu, Pakistan sebelumnya telah mengendalikan cache senjata nuklir dan uji coba nuklir pada tahun 1998.

Pakistan mengalami kemunduran di tangan India karena meningkatnya kerja sama antara pasukan India dan AS. Karena sejarah India dan Pakistan yang malang, Pakistan merasa terus-menerus dikompromikan

oleh tindakan militer India. Pada tahun 2014, Pakistan dan Rusia membentuk koalisi dan menyetujui perjanjian keterlibatan taktis di Islamabad. India dan Pakistan memiliki sejarah tragis yang telah mempengaruhi hubungan mereka masing-masing antara kedua negara. Kashmir adalah awal dari masalah antara kedua negara. Wilayah Kashmir telah ditantang sejak pemisahan India dan Pakistan pada 1947. Setiap wilayah Kashmir saat ini ditentukan oleh India, Pakistan dan Cina. Pada kesempatan inilah India dan Pakistan saling curiga. Kekhawatiran Kashmir menyebabkan konflik berkepanjangan antara India dan Pakistan.

Di kawasan Asia Selatan, India muncul sebagai kekuatan terbesar, dan Pakistan secara umum merasa diremehkan oleh kekuatan India di kawasan itu. Situasi kerangka global pemberontakan mendorong negara-negara untuk memperluas kekuasaan negara dan mencapai kepentingan bersama mereka. Itu diselesaikan oleh India, yang memimpin keterlibatan militer dengan Amerika Serikat pada tahun 2005. Penyelesaian intervensi militer mendapat reaksi positif dari negara-negara tetangga dan musuh seperti Pakistan. Misalnya, keterlibatan militer India-AS melakukan operasi militer bersama, menjual senjata, dan menjalankan misi yang berguna di negara-negara yang menghadapi bencana alam. Intervensi militer telah selesai di wilayah angkatan laut, militer, dan udara. Ini menjadikan India negara paling realistis di Asia Selatan.

2.6 Perang Kashmir (1947-1948)

Pakistan dan India merdeka pada 1947. Mereka melakukan perang pertama mereka di tahun pertama kebebasan mereka. Perang Kashmir 1947-1948 dianggap yang pertama dari empat perang antara kedua negara. Selama proses pemekaran, diputuskan bahwa negara bagian yang berpenduduk mayoritas akan bergabung dengan negara bagian yang mayoritas. Kebanyakan Muslim dengan Pakistan dan Hindu dengan India. Kashmir adalah wilayah mayoritas Muslim yang diperintah oleh seorang penguasa Hindu yang memutuskan untuk mencaplok India meskipun ada tentangan publik.

NWFP saat ini, Khyber Pakhtunkhwa (KP) dan pasukan pendahulu FATA bergerak menuju Srinagar untuk mendukung pertemuan Muslim di Kashmir. Dengan kekuatan ini maju begitu cepat, penguasa Hindu Kashmir mencari dukungan militer paksa dari India. Pasukan India, bersama dengan pasukan Inggris, menduduki wilayah ketiga Kashmir, termasuk Jammu dan Kashmir, di mana wilayah suku menguasai sepertiga lembah, dan Ladakh.

Pada tanggal 1 Januari 1949, gencatan senjata ditandatangani antara Pakistan dan India melalui mediasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan diputuskan bahwa masalah Kashmir akan diselesaikan sesuai dengan keinginan rakyat Kashmir di bawah resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tapi India tidak. Apalagi masalah tersebut masih belum terselesaikan dan telah menjadi penyebab dari tiga perang lagi antara kedua musuh ini, menjadikannya konflik terbesar antara kedua negara.

2.7 Perang Kashmir tahun 1965

Sejak 1965, semua upaya penyelesaian damai konflik Kashmir telah gagal. Konflik besar kedua antara Pakistan dan India adalah Perang 1965, yang merupakan hasil dari serangkaian sengketa perbatasan antara kedua negara yang dimulai tanpa deklarasi perang resmi. Perang dimulai pada 5 Agustus 1965 dan berakhir pada 22 September 1965.

Seperti pada tahun 1947, kapal ini mengirim gerilyawan Pakistan ke lembah pada tahun 1965. Antara 26.000 dan 33.000 tentara Pakistan yang menyamar sebagai warga Kashmir melintasi Garis Kontrol ke berbagai wilayah di wilayah Kashmir. Pasukan India melintasi garis gencatan senjata, dicurigai oleh penduduk setempat Situasi dengan cepat memburuk ketika pasukan India melintasi perbatasan pada 1 September 1965 dan Pakistan melancarkan serangan terhadap Jammu. Sebagai tanggapan, India melancarkan serangkaian serangan melalui provinsi Punjab di Lahore di Pakistan, melawan pasukan Pakistan.

Sebuah akhir resmi untuk perang akan datang setelah penandatanganan Perjanjian Tashkent antara kedua negara. Di akhir perang, kedua negara menyatakan kemenangan. Menurut beberapa analisis netral, India sedang berperang dan beberapa percaya Pakistan memiliki lebih banyak

alasan, tetapi sebagian besar dilihat sebagai jalan buntu. Itu adalah pertempuran tank terbesar di dunia sejak Perang Dunia II. Alasan sebenarnya untuk perang ini lagi-lagi adalah masalah Kashmir, yang belum terselesaikan bahkan setelah perang besar ini. Perang 1965 menyoroti kemampuan tempur, pelatihan dan senjata kedua negara. Sementara itu, kedua negara mulai membangun kekuatan militer mereka ke tingkat yang baru untuk menjaga keseimbangan di kawasan Asia Selatan.

2.8 Perang India-Pakistan tahun 1971

Pada tahun 1971, India dan Pakistan berperang ketiga untuk kemerdekaan Bangladesh, tetapi konflik Kashmir hanyalah masalah sekunder. Namun, Kashmir tidak dibiarkan tidak tersentuh oleh eskalasi perang ini. Perang tahun 1971 mungkin merupakan langkah paling penting antara kedua negara, karena konflik ini mengakibatkan kehancuran Pakistan dan munculnya Pakistan Timur sebagai negara baru, Bangladesh.

Perang saudara pecah di Pakistan Timur menyusul perbedaan politik, ekonomi dan sosial antara kedua sayap negara tersebut. Ini perlahan-lahan menyebabkan kerusuhan di Pakistan timur. Penduduk ini tidak pernah setuju dengan kebijakan pemerintah pusat dan mengklaim bahwa mereka tidak mendapatkan bagian dari keuntungan dan pendapatan negara. Field Marshal Jenderal Ayub Khan mencoba memecahkan masalah dengan memperkenalkan langkah-langkah ekonomi dan politik. Industri pindah ke daerah itu, dan mereka dari sayap pindah ke perusahaan sipil dan militer, tetapi kebijakan ini gagal dan kerusuhan terus meningkat.

India secara aktif ikut campur dalam politik Pakistan Timur dan menyediakan segala macam dukungan logistik. Ia juga melakukan pelatihan militer bagi pemuda Bengali untuk melawan tentara Pakistan. Pakistan kehilangan Pakistan Timur setelah dua minggu berperang dengan India dan sebuah negara merdeka baru bernama Bangladesh didirikan di sana. Selama Perang Bangladesh, tentara India membuka garis depan strategis dengan kehidupan gencatan senjata di Jammu dan Kashmir dan menyerbu wilayah Kashmir di luar garis gencatan senjata. Perang berakhir di Bangladesh setelah semua pasukan Pakistan menyerah kepada pasukan India pada

Desember 1971, dan di barat (khususnya Kashmir) setelah India mendeklarasikan gencatan senjata sepihak pada Desember 1971. .

2.9 Perang Kargil 1999

Pada tahun 1999, Perang Kargil pecah lagi antara Pakistan dan India atas masalah Kashmir. Perang dimulai ketika pejuang kemerdekaan dan tentara Angkatan Darat Pakistan menyerang garnisun India di Kargil selama musim dingin dan merebut sebagian besar pos terdepan India. Angkatan Darat India melakukan serangan balik dengan bantuan Angkatan Udara dan merebut sebagian besar posisi. Militer Pakistan menolak untuk mengakui personel militer terlibat dalam operasi tersebut, tetapi pernyataan kemudian oleh perdana menteri Pakistan dan dokumen yang ditemukan di pangkalan membuktikan bahwa militer Pakistan terlibat dalam operasi tersebut. Selama konflik ini, kedua belah pihak menghadapi berbagai hubungan sebab akibat. .

Meskipun Perang Kargil tidak dianggap sebagai perang skala penuh, ini adalah salah satu konflik besar antara Pakistan dan India. Daerah ini menarik dalam kaitannya dengan masalah Kashmir karena merupakan garis penguatan tentara India yang ada di Lembah Kashmir. Perang menimbulkan ancaman serius perang nuklir. Pasalnya, kedua negara melakukan uji coba nuklir sesaat sebelum konflik ini meletus. Konflik berakhir dengan intervensi komunitas internasional dan tidak pernah meningkat menjadi perang nuklir skala penuh.

Perang Kargil adalah operasi darat terbesar dalam sejarah yang dilakukan oleh Angkatan Darat India dengan dukungan Angkatan Udara. Operasi yang disebut Operasi Vijay ini dimulai pada 26 Mei 1999 dan berlangsung hingga 11 Juli 1999. Perang itu terbatas pada wilayah India. Tentara India tidak berusaha untuk memperpanjang perang di luar garis kendali Kashmir yang diduduki. Ini mungkin perang nuklir yang ada dalam pikiran para ahli strategi India, mengingat pasukan militan Pakistan terus gagal bersatu untuk mencapai tujuan yang diinginkan yaitu merebut India dari India karena takut akan perselisihan. Kashmir. Para ahli strategi berasumsi bahwa setiap upaya pasukan India untuk melintasi Garis Kontrol akan memaksa Pakistan untuk meluncurkan serangan nuklir ke India.

Perang Kargil berakhir setelah Pakistan gagal mencapai tujuannya dan di bawah tekanan dari Amerika Serikat, menambah tekanan dari pertemuan G8 di Cologne, Pakistan memutuskan untuk menerima gencatan senjata yang diumumkan oleh India pada 11 Juli 1999. 16 Juli 1999 adalah batas waktu penarikan penuh Pakistan, yang dipatuhi Pakistan. Amerika Serikat dan G-8 meminta Pakistan untuk menghormati Garis Kontrol dan mematuhi Kesepakatan Shimla 1972 untuk menyelesaikan konflik Kashmir. Menariknya, China, yang telah berhasil membantu Pakistan di Kashmir sejak 26 Oktober 1947, menghindari terlibat dalam masalah Kargil. Ini adalah kegagalan diplomatik terbesar Pakistan. Pakistan terisolasi secara internasional.

Pada 16 Oktober 1999, sebuah kudeta militer pecah di Pakistan, dan pada Desember 1999 Perdana Menteri Nawaz Sharif digulingkan dan melarikan diri ke pengasingan di Arab Saudi. Jenderal Pervez Musharraf mendeklarasikan dirinya sebagai Kepala Eksekutif, Kepala Perang dan kemudian menjadi Presiden Pakistan. Pada Kongres Persemakmuran, Pakistan diasingkan. Pada 24 Desember 1999, sebuah pesawat India yang dikendalikan Delhi dibajak oleh teroris Pakistan. Para teroris menyerukan pembebasan tiga teroris garis keras Rashka-e-Toyshadow yang ditahan di penjara-penjara India sebagai syarat untuk menyelamatkan sebuah pesawat yang dibajak dengan 178 penumpang di dalamnya. India setuju dan pada 31 Desember 1999, menukar penumpang dengan tiga teroris garis keras.

Terorisme dan kerusuhan lintas batas terus meningkat, meninggalkan perang lain antara India dan Pakistan di lepas pantai Jammu dan Kashmir dan meningkatkan risiko perang nuklir di Asia Selatan. India menyatakan gencatan senjata sepihak di sepanjang garis kendalinya malam sebelumnya. Pakistan dalam negosiasi. Pemerintah India setuju untuk mengundang Pakistan dengan syarat menghentikan terorisme lintas batas. Pakistan menyambut baik gencatan senjata India di sepanjang Garis Kontrol tetapi menolak untuk berhenti mendukung terorisme lintas batas di Kashmir. Meskipun Pakistan secara konsisten berkomitmen untuk menyamakannya dengan perjuangan untuk kebebasan, masih ada upaya oleh pemerintah India

untuk memulai negosiasi ulang. Dia secara terbuka mendukung kesepakatan tersebut. teroris yang dikenal sebagai Islam, berkomentar bahwa Islam tidak memiliki batas politik dan bahwa jihad adalah konsep Sang Pencipta.

2.10 Internasionalisasi Kasus Kashmir

Pada tanggal 21 April 1948, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang menyatakan bahwa referendum harus diadakan di wilayah Kashmir dan diawasi oleh badan UNCIP. Namun dalam menjalankan kehendak rakyat Kashmir, India selalu dan sering menundanya. Di wilayah perbatasan atau yang biasa dikenal dengan Line of Control yang memisahkan wilayah Pakistan dengan Pakistan, India malah terus menerus mengerahkan sekitar 410.000 tentara. Selama beberapa tahun, India memandang konflik tersebut sebagai konflik bilateral antara India dan Pakistan, dan bahwa hak dan keinginan rakyat Kashmir, yang diamanatkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), prinsip-prinsip masa depan Jammu dan Kashmir, telah ditentukan. , sesuai dengan aspirasi rakyat Kashmir.

Ketika India gagal memenuhi mandatnya yang ditetapkan oleh PBB, kelompok pemberontak dengan ambisi untuk kemerdekaan wilayah Kashmir muncul: Lashkar-e-Taiba dan Tentara Hizbul Mujahidin. Delegasi dari masing-masing negara dikirim untuk membantu menyelesaikan perselisihan. Isu yang dimaksud Islamabad adalah Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh India di wilayah Kashmir, melanggar demokrasi berupa hak suara. Sekitar 2.400 orang tewas di tempat interogasi, dengan 40 hingga 50 orang meninggal setiap hari. Tindakan kekerasan ini merupakan akibat dari tindakan oknum pejabat dan angkatan bersenjata India.

Masalah Kashmir diangkat pada Mei 1993 oleh Partai Buruh Inggris, yang meminta pemerintah Inggris untuk menekan India agar memberi rakyat Kashmir kesempatan untuk menentukan nasib sendiri. Dengan internasionalisasi masalah Kashmir, masyarakat internasional harus diminta untuk campur tangan dalam masalah konflik Kashmir. Menteri Luar Negeri Pakistan Riaz Mohammed Khan dan 10 anggota delegasi Pakistan melakukan perjalanan ke New Delhi untuk pembicaraan yang berlangsung pada 17 Januari 2006.

Kemudian, Pakistan juga meminta bantuan PBB untuk berpartisipasi dalam penyelesaian masalah Kashmir. Nawaz Sharif mengangkat isu Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa pada Februari 1993, khususnya terhadap umat Islam yang dikenai sanksi karena pelanggaran hak asasi manusia. Seiring berjalannya waktu, Pakistan tidak lagi menganggap masalah konflik Kashmir sebagai perhatian serius negara lain. Oleh karena itu, satu-satunya strategi untuk mengalihkan pandangan dunia internasional adalah strategi nuklir, dan akhirnya organisasi internasional sekali lagi menempatkan masalah Kashmir dalam agenda yang sangat penting dalam forum internasional, baik forum regional maupun PBB. menentang keras segala upaya pihak ketiga untuk ikut campur dalam urusan wilayah Kashmir.

2.11 Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Alfi Rizky yang berjudul “Pengaruh perebutan wilayah kashmir terhadap hubungan diplomatik india-pakistan periode 2011-2013”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Konflik perebutan wilayah Kashmir yang melibatkan dua Negara yakni India dan Pakistan, telah lama terjadi, yaitu dari tahun 1947. Konflik itu belum menetapkan sesuatu yang layak disepakati untuk keharmonisan. Upaya yang berbeda telah dilakukan untuk mengakomodasi kedua Negara yang belum selesai dengan kekecewaan. Hal ini menyebabkan masa-masa yang menjanjikan dan kurang menjanjikan dalam hubungan strategis antara kedua negara.

Persamaan peneliti terdahulu dengan yang saya teliti adalah mengenai konflik perebutan wilayah kashmir. Perbedaannya yaitu peneliti yang sebelumnya meneliti terkait hubungan diplomatik antara india dan pakistan, sedangkan peneliti sendiri meneliti mengenai pengaruh konflik terhadap hubungan bilateral india dan pakistan.

2. Penelitian relevan yang dilakukan oleh UM. Khoiriyah yang berjudul “Upaya diplomasi koersif India terhadap Pakistan dalam konflik sengketa wilayah Kashmir tahun 2012-2018”. Hasil penelitian ini menunjukkan

bahwa Dalam konflik ini sangat terlihat bahwa segala upaya diplomatis India dan Pakistan tidak ada yang mampu bertahan dalam kedamaian untuk jangka panjang. Pada dasarnya, partisipasi orang luar, misalnya, SAARC, PBB dan beberapa negara adidaya telah dicari. Prospek siapa yang paling banyak membantu dan keraguan umum satu sama lain menjadi salah satu variabel dalam perselisihan yang tidak terpikirkan untuk berakhir.

Persamaan peneliti terdahulu dengan yang saya teliti adalah mengenai konflik perebutan wilayah Kashmir. Perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya meneliti mengenai upaya diplomasi koersif antara India dan Pakistan, sedangkan peneliti sendiri meneliti mengenai pengaruh konflik terhadap hubungan bilateral India dan Pakistan.

3. Penelitian relevan yang dilakukan oleh Didit Dwilala yang berjudul "Konflik India-Pakistan Dalam Perebutan Wilayah Kashmir tahun 1990-1998 (Studi Kasus Persaingan Bidang Militer)". Hasil penelitian ini menjelaskan mengenai konflik antara India dan Pakistan dari tahun 1990-1998 dalam perebutan wilayah Kashmir hingga persingannya dalam bidang militer.

Persamaan peneliti terdahulu dengan yang saya teliti adalah mengenai konflik perebutan wilayah Kashmir. Perbedaannya adalah peneliti terdahulu meneliti terkait konflik dengan studi kasus persaingan di bidang militer, sedangkan peneliti sendiri meneliti mengenai pengaruh konflik terhadap hubungan bilateral India dan Pakistan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan penekanan pada analitik. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses pemaknaan (perspektif tematik). Sebuah landasan teori untuk mendamaikan data yang diperoleh dan pendekatan penelitian dipandu. Alasan tersebut juga berguna sebagai gambaran latar belakang penelitian dan sebagai sumber pembahasan hasil penelitian (Sugishirono, 2014:03).

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian historis kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang dalam membahas masalah berpedoman pada literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian, yaitu yang berkaitan dengan Konflik Kashmir dan Pengaruhnya Terhadap Hubungan Bilateral India Paksitan 2015-2021.

3.2 Batasan Temporal

Jika kita membahas tentang konflik kashmir dan pengaruhnya terhadap hubungan bilateral india pakistan tidak akan cukup dengan satu judul saja, karena cangkupan untuk perkembangan konflik dalam perebutan wilayah ini sangat panjang tetapi peneliti akan membatasi cangkupan penelitian pada tahun yang di tentukan yaitu tahun 2015-2021 karena dalam kurun waktu itu terlihat konflik dari kedua negara tersebut yang tak kunjung usai.

3.3 Pendekatan Historis

Dalam penyusunan proposal ini, peneliti menggunakan pendekatan historis. Dimana strategi ini memiliki kemampuan untuk mereproduksi data pada kesempatan sebelumnya dengan sengaja dan tidak memihak. Melalui bermacam-macam informasi, survei, mendemonstrasikan dan memadukan bukti lapangan. Dalam teknik Otentik ini ada heuristik, reaksi, pemahaman dan historiografi. Maka untuk mengumpulkan data penelitian ini menggunakan teknik stud ipustaka.

Saat memimpin pemeriksaan dengan teknik otentik ini, berfokus pada beberapa tahap seperti yang dirujuk di atas sangat penting. Dimana sesuai Kuntowijoyo (dalam Priyadi S, 2012: 3) teknik pemeriksaan otentik terdiri dari (1) pilihan tema, (2) bermacam-macam sumber, (3) periksa (analisis ke dalam dan luar), (4) terjemahan (investigasi dan penggabungan), (5) penulisan, sedangkan menurut Susanto dalam (Priyadi Sugeng, 2012: 3) meliputi (1) heuristik (mencari sumber-sumber), (2) kritik atau analisis (menilai sumber-sumber), (3) interpretasi atau sintesis (menafsirkan keterangan sumber-sumber), dan (4) historiografi (penulisan sejarah). Untuk melihat lebih jelasnya sebagai berikut:

3.3.1 Heuristik (pengumpulan sumber-sumber sejarah)

Tahap utama dari setiap penelitian yang dapat diverifikasi adalah menemukan dan mengumpulkan sumber daya yang terkait dengan penelitian yang telah diselesaikan. Metode pengumpulan sumber yang paling umum dalam ujian nyata disebut heuristik. Menurut Ismaun (2005:49), heuristik adalah pencarian berbagai sumber informasi yang dapat diverifikasi yang relevan dengan masalah yang diajukan oleh seorang ilmuwan. Caranya adalah dengan mencari dan mengumpulkan sumber-sumber, buku-buku dan artikel-artikel yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian Anda. Sumber otentik langsung tersedia sebagai sumber warisan, sumber editorial, dan sumber lisan. Sumber yang dapat diidentifikasi sebagai sumber otoritatif dan reguler lebih luas dan dapat diverifikasi. Selanjutnya, mereka dikelompokkan menjadi Sumber Esensial dan Sumber Opsional.

Menurut G.J. Reiner (dalam Abdurahman, 2007:64) heuristik adalah strategi, seni, bukan ilmu. Oleh karena itu, heuristik tidak memiliki prinsip yang mendasarinya, melainkan merupakan langkah awal (Helius S, 2012:67) atau dalam bahasa Jerman *Quellenkunde* (mengacu pada sumber untuk memperoleh informasi yang dapat diverifikasi, bukti fisik, atau bukti yang dapat dipercaya), gerakan untuk menemukan). Heuristik ini membutuhkan investasi, biaya, usaha, refleksi, dan emosi. Oleh karena itu, peneliti terlebih dahulu menyusun strategi bagaimana dan dimana memperoleh bahan-bahan tersebut. Siapa atau kantor apa yang bisa saya hubungi, berapa biaya

perjalanan, dll.

Dari sebagian definisi di atas, dapat dilihat bahwa pada tahap ini, para ilmuwan mencari, mengumpulkan, dan memesan berbagai sumber yang terhubung dengan subjek eksplorasi. Untuk mengumpulkan sumber informasi yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti mencari beberapa buku, arsip, jurnal, dan referensi lain yang pasti relevan dengan topik penelitian, dari individu yang berbeda dan lokasi yang berbeda, yang tidak akan pernah saya lupakan. Terlebih lagi, analisis juga menggunakan artikel buku harian yang didapat dari melihat-lihat tujuan web.

3.3.2 Kritik Sumber

Setelah mengumpulkan dan berbagai catatan signifikan dari sumber-sumber yang telah diperoleh, tahap berikut adalah meneliti sumber-sumbernya. Fase analisis sumber ini adalah tahap untuk memutuskan kemungkinan uji coba sumber, terlepas dari apakah sumber tersebut dapat digunakan dalam ulasan ini. Dalam teknik otentik untuk melakukan analisis harus dimungkinkan dalam dua cara, untuk menjadi spesifik Analisis dalam dan luar.

1. Kritik Internal

Analisis dalam artian menguji kualitas dan kepercayaan sumber yang terpercaya. Kritik ini mempertanyakan isi dari sumber-sumber sejarah. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sugeng (2012: 67) bahwa selama tahap 'kritik internal', peneliti mengevaluasi sumber sejarah baik dari segi isi maupun bentuk. tentang fakta tentang konflik kashmir dan pengaruhnya terhadap hubungan bilateral india pakistan 2015-2021.

2. Kritik Eksternal

Seperti yang diusulkan istilah ini, analisis eksternal adalah untuk memeriksa atau menguji bagian luar dari sumber otentik. Sebelum setiap sumber yang dikumpulkan oleh ilmuwan dapat digunakan untuk menciptakan kembali yang sebelumnya, penilaian menyeluruh pada awalnya harus dilakukan (Helius S,2012:104).

Apa yang tersirat dari analisis eksternal adalah uji coba kepraktisan sumber yang dapat diverifikasi yang akan digunakan sebagai bahan pendukung dalam eksplorasi otentik dengan memeriksa di sudut pandang luar, sebelum memeriksa substansi sumber-sumber ini. Analisis eksternal juga dilakukan untuk membatasi subjektivitas dari berbagai sumber yang telah didapat.

Dalam penelitian ini, sumber yang digunakan sebagai bahan pendukung adalah sumber yang relevan. dengan konflik kashmir dan pengaruhnya terhadap hubungan bilateral india pakistan 2015-2021, Ini adalah sumber informasi utama yang digunakan sebagai referensi bagi peneliti. Selain itu, penelitian ini juga didasarkan pada latar belakang penulis dan kapan ditulis.

3.3.3 Interpretasi (menafsirkan sumber sejarah)

Interpretasi adalah karya untuk memahami dan mencari hubungan antara realitas yang dapat diverifikasi dengan tujuan yang berubah menjadi solidaritas total dan objektif. Terjemahan ini juga sering disebut penyelidikan yang dapat diverifikasi. Menurut Kuntowijoyo (dalam Abdurahman, 2007:73), pemeriksaan yang dapat diverifikasi itu sendiri mengharuskan untuk memadukan atau berbagai realitas yang diperoleh dari sumber-sumber otentik dan bersama dengan hipotesis dikumpulkan realitas-realitas itu dalam terjemahan yang komprehensif.

Menurut Kartidirdjo (dalam Sugeng, 2012:71) dalam sejarah ada dua komponen penting, khususnya realitas yang dapat diverifikasi dan pemahaman atau terjemahan. Jika itu hanyalah sebuah interpretasi, maka, pada saat itu, sejarah hanyalah sebuah cerita, dengan kata lain, kumpulan kesempatan. Dengan asumsi tidak ada kenyataan, sejarah menantang untuk ditata. Para ilmuwan menguraikan atau menguraikan realitas yang dapat diverifikasi yang terdiri dari mentifact (mental), sosifact (hubungan sosial), dan kelangkaan kuno (objek).

Pada tahap ini, analisis harus benar-benar berhati-hati dalam melakukan penerjemahan karena tahap ini adalah tahap terakhir untuk memutuskan legitimasi informasi atau hubungan realitas antara satu sama

lain sifatnya ilmiah untuk menuju penulisan sejarah.

3.3.4 Historiografi (Penulisan Sejarah)

Tahap terakhir dari peninjauan adalah untuk memperkenalkan konsekuensi dari ulasan tersebut. Pada tahap ini, analis memahami dan melaporkan semua pemeriksaan membawa struktur yang tersusun.

Historiografi menurut Ismaun, (2005:28), "menandakan karya seni sejarah, gambar yang dapat diverifikasi dari peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelumnya". Pada tahap ini, spesialis memberi tahu, menciptakan kembali kesempatan yang dapat diverifikasi dari realitas yang didapat setelah menyelesaikan tahapan masa lalu, mulai dari pencarian informasi pembuktian, pencatatan, analisis, hingga fase pengaturan atau pemahaman. Hal-hal yang didapat disatukan oleh pemahaman mereka sehingga konsekuensi historiografi adalah sebagai rekreasi dari kesempatan yang dapat diverifikasi.

Maka pada tahap penelitian ini dilakukan Semua hasil dalam Bab 1 sampai 5 telah disiapkan dan ditranskrip berdasarkan bukti dari sumber yang tersedia bagi peneliti dan telah dipilih, dianalisis, dan direkonstruksi menggunakan fakta yang konsisten dengan judul penelitian.

3.4 Data dan Sumber Data

3.4.1 Data

Data adalah apa yang dikumpulkan ilmuwan sebagai realitas yang diamati yang digunakan untuk memecahkan masalah dan menjawab pertanyaan penelitian (Siyoto et al, 2015). Materi yang tidak dapat disangkal, yang hanya memerlukan organisasi, tekad, dan karakterisasi dari berbagai sumber terbuka, pada dasarnya didasarkan pada penelitian aktual untuk memperoleh data tentang berbagai hal yang disebut informasi. merupakan variabel yang membuka pintu yang berpotensi terbuka (Abdurrahman, D. 2007: 40).

3.4.2 Sumber Data

Semua itu secara lugas atau tidak langsung mencerahkan publik mengenai sesuatu dari dunia nyata atau tindakan manusia dari beberapa

waktu yang lalu (dalam Syamsul 2015:21). Sementara itu, menurut Arikunto (2006: 84) sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh.

Dalam menyusun penelitian ini, sumber informasi yang tersusun, dimanfaatkan dengan alasan bahwa dengan tersusunnya spesialis informasi dapat memperoleh sumber penelitian. Sedangkan menurut Sugiyono (2010:134), sumber informasi dalam penelitian ini adalah sumber informasi yang diperoleh dari subjek selama penelitian.

3.5 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2014), dalam eksplorasi subjektif, pemeriksaan informasi subjektif adalah cara paling umum untuk menemukan, memecah, dan dengan sengaja mengumpulkan informasi yang didapat dari wawancara, catatan lapangan, dan materi yang berbeda yang menunjuk ke arah membuatnya lebih mudah bagi populasi secara keseluruhan untuk memahami dan menegaskan konsekuensi dari pemeriksaan.

Sementara itu, Milles dan Huberman (1992) menyatakan bahwa dalam pemeriksaan informasi harus dilakukan secara terus-menerus dan selesai, untuk membenamkan informasi. Efek samping dari perendaman informasi yang tinggi ditunjukkan oleh kekurangan informasi atau data baru yang dapat mempengaruhi konsekuensi eksplorasi yang telah dilakukan melewati hasil yang ditegaskan.

Investigasi informasi yang telah diusulkan oleh Milles dan Huberman yang digambarkan sebelumnya memiliki 3 (tiga) tahap, khususnya; reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.

3.5.1 Reduksi Data

Informasi yang telah diperoleh dari berbagai sumber tidak dapat ditolak bahwa jumlahnya sangat besar sehingga di sinilah peneliti diharapkan untuk mencoba memilih dan mencari tahu informasi dengan hati-hati untuk mendapatkan gambaran yang masuk akal dan membuatnya lebih mudah bagi spesialis pada tahap berikut.

Cara paling umum untuk memilih, memusatkan perhatian pada disentangling, abstraksi, dan data informasi yang muncul dari akun yang

disiapkan di lapangan disebut Penurunan Informasi. Selama bermacam-macam informasi konstan, fase penurunan berikut terjadi (menyimpulkan, mengkodekan, mengikuti subjek, membuat kelompok, membuat pengingat). Penurunan informasi ini terus berlanjut sampai laporan terakhir lengkap dikumpulkan.

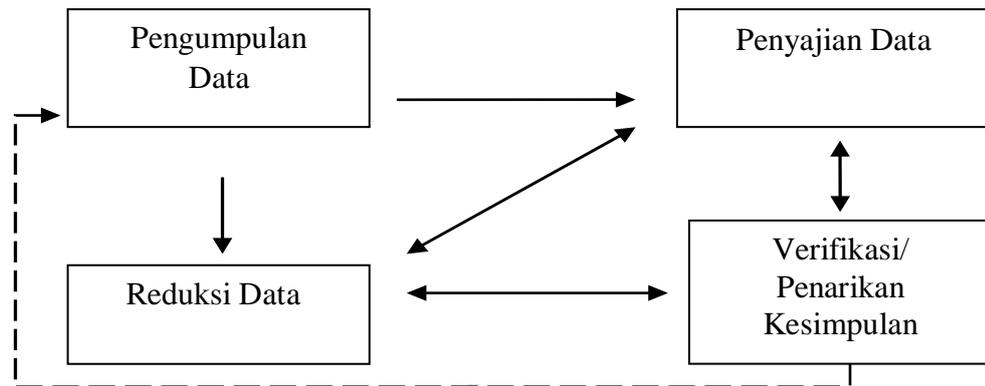
3.5.2 Data Display (Penyajian Data)

Setelah reduksi data, hal ini dilakukan dengan menyajikan data. Penelitian kualitatif ini memungkinkan Anda untuk melengkapi pengenalan informasi dalam bentuk deskripsi singkat, diagram, koneksi antar kelas, diagram alur, dll. Miles dan Huberman (1992) menunjukkan bahwa teks naratif paling sering digunakan untuk memperkenalkan informasi ke dalam eksplorasi subjektif. Miles dan Huberman membantu ilmuwan subjektif dengan model penyajian informasi yang menyaingi model penyajian informasi subjektif statis, menggunakan tabel, bagan, operasi aritmatika, dll. yang sarat dengan kata-kata dan kata-kata fase alih-alih angka.

3.5.3 Verifikasi/Penarikan Kesimpulan

Tahap selanjutnya dalam pemeriksaan kualitatif menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2013: 235) adalah dalam fase membuat keputusan berdasarkan penemuan dan konfirmasi data. Ujung-ujung yang mendasari yang ditetapkan ke depan belum bersifat sementara dan akan berubah dengan asumsi bukti baru dilacak yang menjunjung tinggi fase bermacam-macam data berikut. Untuk memperoleh bukti logis yang disinggung sebagai konfirmasi data dengan asumsi bahwa ujung-ujung yang ditemukan pada fase awal ditegakkan oleh bukti yang kuat karena dalam mereka dapat diprediksi dengan keadaan yang ditemukan ketika spesialis kembali ke lapangan, ujung-ujungnya adalah ujung yang sehat. Secara skematis, pemeriksaan data yang menggunakan model investigasi data cerdas Miles dan Huberman harus terlihat dalam garis besar yang menyertainya:

Bagan 1 : Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman



Sumber : Analisis Data Kualitatif (Ahmad Rajali, 2018:83)

3.6 Keabsahan Data

Validitas data penelitian tercermin dari evaluabilitas data ditinjau dari validitas dan reliabilitas data penelitian. Keandalan dapat dicapai melalui catatan lapangan dan prosedur yang harus diikuti, (Sugiyono, 2010:65).

Demi mendapatkan keabsahan data, peneliti melakukan beberapa diskusi dengan teman sejawat yang berkaitan dengan tentang konflik kashmir dan pengaruhnya terhadap hubungan bilateral india pakistan, kemudian peneliti mengkaitkan dengan perkembangan dari beberapa tahun (2015-2021). Hal itu menjadi salah satu titik acuan dalam perselisihan antara kedua negara. Peneliti berdiskusi dengan teman di waktu senggang, peneliti mencari data tambahan untuk berbagai jenis berita terkait perkembangan situasi di kedua negara.